

POLITIK ISLAM DI TENGAH DEMOKRASI: ANTARA NILAI, KEPENTINGAN, DAN POLITISASI AGAMA

Elis Octaviani¹, Ganjar Eka Subakti²

¹²Universitas Pendidikan Indonesia ,

elisoctviany22@upi.edu , ganjarekasubakti@upi.edu

Abstract

Penelitian ini mengkaji relasi Islam dan demokrasi dalam dinamika politik Indonesia pasca-reformasi. Agama tidak hanya berperan sebagai nilai spiritual, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan Islam dan demokrasi serta dampak penggunaan identitas keagamaan dalam praktik politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas mahasiswa aktif organisasi keagamaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dipahami sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan bernegara. Namun, penggunaan simbol dan identitas agama dalam kontestasi politik cenderung memperkuat politik identitas, memicu polarisasi sosial, dan mengurangi rasionalitas publik dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada instrumentalitas agama untuk kepentingan politik pragmatis, bukan pada keberadaan agama dalam ruang publik.

Kata Kunci : *Politik Islam, Demokrasi, Politik Agama, Politik Identitas, Indonesia*

Abstract

This study examines the relationship between Islam and democracy in the dynamics of post-reform Indonesian politics. Religion not only plays a role as a spiritual value but also influences the social and political life of society. The study aims to analyze the relationship between Islam and democracy and the impact of the use of religious identity in political practice. The method used is qualitative with a descriptive approach through in-depth interviews and literature review. The research informants consisted of active students of religious organizations at UIN Sunan Gunung Djati Bandung and lecturers of Islamic Religious Education at the Indonesian University of Education. The results show that Islam is understood as a moral and social guideline in national life. However, the use of religious symbols and identities in political contestation tends to strengthen identity politics, trigger social polarization, and reduce public rationality in political decision-making. This study emphasizes that the main problem lies in the instrumentalization of religion for pragmatic political interests, not in its presence in the public sphere.

Keywords : *Islamic Politics, Democracy, Politicization of Religion, Identity Politics, Indonesia*

1. Pendahuluan

Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan salah satu diskursus yang terus berkembang dalam kajian politik kontemporer di Indonesia (Musawamah et al. 2025). Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam relasi antara agama dan kekuasaan. Agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan yang bersifat privat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan orientasi sosial dan budaya politik masyarakat. Di sisi lain, demokrasi sebagai sistem politik modern menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam perkembangan politik Indonesia, relasi antara Islam dan demokrasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama setelah Reformasi 1998. Terbukanya ruang demokrasi memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok-kelompok keagamaan untuk terlibat dalam arena politik. Fenomena tersebut terlihat melalui meningkatnya penggunaan simbol keagamaan, narasi identitas umat, serta mobilisasi massa berbasis agama dalam berbagai momentum politik nasional.

Pada praktiknya, agama tidak lagi hadir semata-mata sebagai sumber etika dan moralitas publik, melainkan juga digunakan sebagai instrumen legitimasi politik (Azhar 2026). Penggunaan identitas keagamaan dalam kontestasi elektoral sering kali dilakukan untuk membangun loyalitas kelompok, memperoleh dukungan massa, dan memperkuat basis politik tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki posisi yang strategis dalam dinamika demokrasi Indonesia. Namun demikian, keterlibatan agama dalam politik juga memunculkan berbagai persoalan sosial. Politisasi agama yang berkembang dalam praktik demokrasi seringkali melahirkan polarisasi sosial, memperkuat sentimen identitas, serta memunculkan segregasi di tengah masyarakat yang plural. Dalam beberapa kasus, perbedaan pilihan politik bahkan berkembang menjadi konflik sosial yang dipengaruhi oleh sentimen keagamaan.

Diskursus mengenai hubungan Islam dan demokrasi juga berkembang dalam lingkungan akademik maupun organisasi keagamaan (Hidayatullah 2026). Sebagian kelompok memandang demokrasi sebagai sistem yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Akan tetapi, sebagian kelompok lainnya memandang demokrasi sekuler bertentangan dengan prinsip kedaulatan Tuhan dalam Islam. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa relasi Islam dan demokrasi di Indonesia bersifat dinamis dan multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pandangan mengenai politik Islam di tengah demokrasi dipahami oleh kalangan akademisi dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk politisasi agama serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji

hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perkembangan politik Indonesia setelah era Reformasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam ditempatkan dalam kehidupan politik demokratis, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk politisasi agama yang berkembang dalam praktik politik (Atikah, Muary, and Pohan 2025). Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis pandangan mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman dan akademisi terhadap keterlibatan agama dalam politik serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara penerapan nilai-nilai agama sebagai pedoman moral dalam politik dengan pemanfaatan agama sebagai sarana untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Kajian mengenai politisasi agama menjadi penting karena perkembangan demokrasi dan teknologi komunikasi telah memberikan ruang yang semakin luas bagi penyebaran narasi serta identitas keagamaan dalam kehidupan politik (Rahmadani and Pradipta 2026). Pemanfaatan identitas agama yang tidak proporsional dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat, meningkatkan fanatisme kelompok, dan memperbesar potensi terjadinya polarisasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang kritis agar agama tetap dapat berfungsi sebagai sumber nilai, etika, dan moralitas dalam kehidupan publik tanpa dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi dalam memahami dinamika politik Islam di Indonesia sekaligus mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih rasional, inklusif, dan menghargai keberagaman masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan politik Islam, demokrasi, politik identitas, dan politisasi agama di Indonesia. Fokus utama penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan berasal dari sumber akademik terpercaya yang membahas hubungan Islam dan demokrasi, perkembangan politik identitas, serta praktik politisasi agama dalam konteks demokrasi Indonesia (Hisaanah et al. 2026).

Selain studi pustaka, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis. Wawancara dilakukan terhadap seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang aktif dalam organisasi keislaman serta seorang dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki pemahaman keagamaan dan sosial. Data wawancara digunakan untuk melihat bagaimana pandangan akademisi dan mahasiswa terhadap praktik politik Islam dan demokrasi dalam realitas sosial. Teknik

analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara interpretatif dan kemudian diperkuat dengan hasil wawancara agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena politik Islam di tengah demokrasi Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Islam sebagai Sistem Nilai dalam Kehidupan Politik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua narasumber memandang Islam tidak hanya sebagai agama dalam dimensi ritual, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan bernegara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agama memiliki posisi penting dalam pembentukan etika politik dan moralitas publik. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman memandang Islam sebagai sistem kehidupan yang mencakup seluruh aspek sosial dan politik. Menurutnya, demokrasi modern memiliki persoalan mendasar karena menempatkan kedaulatan pada manusia, sedangkan Islam menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan utama kehidupan bernegara. Perspektif tersebut menunjukkan kecenderungan pemikiran Islam ideologis yang memandang agama sebagai dasar sistem politik.

Di sisi lain, dosen Pendidikan Agama Islam memandang bahwa Islam tidak secara rigid (kaku, keras, atau tegas. Kata ini merujuk pada sesuatu yang tidak fleksibel, tidak dapat diubah, atau tidak mudah dilenturkan) menentukan bentuk negara tertentu. Islam lebih menekankan pada nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan moralitas dalam kepemimpinan. Demokrasi dipandang dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan etika sosial. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dua kecenderungan besar dalam diskursus politik Islam di Indonesia, yaitu pendekatan formalis dan pendekatan substantif.

Dalam kehidupan politik, Islam dapat dipahami sebagai sumber nilai yang mengarahkan pelaksanaan kekuasaan agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut menempatkan kekuasaan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kepentingan politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai keislaman dapat berjalan berdampingan dengan prinsip demokrasi tanpa harus diwujudkan melalui bentuk negara yang secara formal berlandaskan agama. Islam dengan demikian dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan politik melalui pembentukan moral dan etika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Hidayat, 2020).

Keterlibatan umat Islam dalam bidang politik juga merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan kehidupan masyarakat dan negara (Robbani 2025). Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti mengikuti pemilihan umum, aktif dalam organisasi kemasyarakatan, terlibat dalam kegiatan pendidikan politik, maupun melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kontribusi umat Islam dalam

demokrasi tidak terbatas pada aktivitas partai politik yang membawa identitas keagamaan. Mujani (2007) menjelaskan bahwa masyarakat Muslim di Indonesia memiliki peranan dalam perkembangan budaya demokrasi dan partisipasi politik. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam politik dapat memberikan dampak positif apabila diwujudkan melalui keterlibatan politik yang bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik juga harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama, budaya, dan kelompok sosial (Wardana and Zalsabila 2025). Nilai agama seharusnya tidak dijadikan dasar untuk membatasi hak kelompok lain atau menciptakan pemisahan berdasarkan identitas keagamaan. Hefner (2001) menunjukkan bahwa perkembangan Islam dalam proses demokratisasi Indonesia dapat membentuk hubungan yang konstruktif antara nilai-nilai keislaman dan demokrasi. Oleh karena itu, Islam sebagai sistem nilai dalam kehidupan politik dapat ditempatkan sebagai sumber etika yang mendorong terciptanya keadilan, tanggung jawab, kesetaraan, dan kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik secara pragmatis.

3.2 Politisasi Agama dalam Demokrasi Indonesia

Fenomena politisasi agama menjadi salah satu isu utama yang muncul dalam wawancara dan berbagai kajian akademik mengenai demokrasi Indonesia pasca reformasi (Lestari 2025). Kedua narasumber sepakat bahwa agama sering kali dimanfaatkan dalam kontestasi politik elektoral untuk memperoleh dukungan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa agama tidak hanya hadir sebagai sumber moralitas publik, tetapi juga digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik. Kurniawan (2018) menjelaskan bahwa berkembangnya politik pasca-kebenaran di Indonesia menyebabkan sentimen identitas dan emosi keagamaan lebih dominan dibandingkan rasionalitas publik dalam menentukan pilihan politik. Kondisi tersebut terlihat melalui penggunaan simbol agama, narasi keumatan, hingga penyebaran opini politik berbasis identitas yang bertujuan membangun loyalitas kelompok tertentu.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Widiatmaka dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa politisasi agama dalam pemilihan umum dapat memunculkan polarisasi sosial dan memperlemah kohesi masyarakat. Dalam praktik demokrasi Indonesia, identitas agama sering digunakan untuk membedakan kelompok politik “kita” dan “mereka”, sehingga memperkuat segregasi sosial di tengah masyarakat plural. Hidayat dan Hidayah (2024) juga menjelaskan bahwa menjelang Pemilu 2024, politik identitas berbasis agama kembali mengalami peningkatan melalui media sosial dan ruang publik digital. Agama digunakan sebagai alat legitimasi politik sekaligus strategi membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Muslim. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi digital turut memperluas ruang reproduksi politik identitas di Indonesia.

Dalam perspektif mahasiswa organisasi keislaman, politisasi agama terjadi karena sistem demokrasi membuka ruang kompetisi politik yang mendorong elit menggunakan agama sebagai alat legitimasi. Sementara itu, dosen Pendidikan Agama Islam menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada agama, melainkan pada perilaku elit politik yang memanfaatkan agama demi kepentingan pragmatis. Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh Wingarta dkk. (2021) yang menyatakan bahwa politik identitas dapat menurunkan kualitas demokrasi apabila masyarakat lebih mengedepankan kesamaan identitas dibandingkan kapasitas kepemimpinan dan substansi program politik. Fenomena politisasi agama menjadi salah satu isu utama yang muncul dalam wawancara. Kedua narasumber sepakat bahwa agama sering kali dimanfaatkan dalam kontestasi politik elektoral untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Penggunaan simbol agama, narasi identitas keumatan, serta kampanye berbasis sentimen keagamaan dinilai semakin meningkat dalam beberapa momentum politik nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agama tidak lagi sekadar menjadi sumber etika politik, tetapi telah bergeser menjadi instrumen mobilisasi kekuasaan. Dalam perspektif mahasiswa organisasi keislaman, politisasi agama terjadi karena sistem demokrasi membuka ruang kompetisi politik yang mendorong elit menggunakan agama sebagai alat legitimasi. Sementara itu, dosen Pendidikan Agama Islam menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada agama, melainkan pada perilaku elit politik yang memanfaatkan agama demi kepentingan pragmatis. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Kurniawan (2018) yang menjelaskan bahwa politik pasca-kebenaran memperkuat penggunaan identitas agama dalam membangun opini publik dan loyalitas kelompok.

3.3 Dampak Politisasi Agama terhadap Kehidupan Sosial

Politisasi agama dalam praktik demokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan identitas agama secara berlebihan dalam politik berpotensi menimbulkan polarisasi sosial dan memperkuat segregasi kelompok. Sejati dan Hakim (2023) menjelaskan bahwa berkembangnya politik primordial dan politik identitas dalam demokrasi lokal Indonesia telah memunculkan fragmentasi sosial yang cukup kuat di masyarakat. Pilihan politik tidak lagi didasarkan pada rasionalitas publik, melainkan pada kedekatan identitas agama, budaya, maupun kelompok tertentu.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat seringkali terjebak dalam fanatisme identitas sehingga rasionalitas politik menjadi melemah. Kedua narasumber menilai bahwa pilihan politik masyarakat dalam beberapa momentum elektoral lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen keagamaan dibandingkan kualitas kepemimpinan. Mulyadi dkk. (2024) menjelaskan bahwa politik identitas yang berkembang secara berlebihan dapat menyebabkan degradasi demokrasi karena masyarakat menjadi mudah terpecah oleh perbedaan identitas. Demokrasi tidak lagi dipahami sebagai ruang dialog dan kompetisi

gagasan, melainkan arena pertarungan identitas kelompok.

Selain itu, Tumanggor dan Azhar (2025) menjelaskan bahwa mobilisasi identitas agama dalam ruang demokrasi berpotensi mengurangi kohesi sosial masyarakat multikultural. Penggunaan identitas secara terus-menerus dalam politik dapat melahirkan stereotip, intoleransi, dan eksklusivisme sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun budaya politik yang inklusif dan rasional. Politik identitas yang berkembang secara berlebihan berpotensi melemahkan persatuan sosial di tengah masyarakat multikultural. Politisasi agama dalam praktik demokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan identitas agama secara berlebihan dalam politik berpotensi menimbulkan polarisasi sosial dan memperkuat segregasi kelompok.

Kedua narasumber menilai bahwa masyarakat seringkali terjebak dalam fanatisme identitas sehingga rasionalitas politik menjadi melemah. Pilihan politik tidak lagi didasarkan pada kapasitas dan kualitas kepemimpinan, melainkan pada kesamaan identitas keagamaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun budaya politik yang inklusif dan rasional. Politik identitas yang berkembang secara berlebihan berpotensi melemahkan persatuan sosial di tengah masyarakat multikultural.

Selain memicu polarisasi sosial, politisasi agama juga berdampak pada kualitas hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaitan pilihan politik dengan identitas keagamaan mendorong masyarakat untuk menilai individu atau kelompok berdasarkan kesamaan agama, bukan pada gagasan, kompetensi, maupun program politik yang ditawarkan. Akibatnya, ruang dialog yang terbuka dan sikap saling menghormati antarkelompok menjadi semakin terbatas, sementara prasangka, sikap eksklusif, dan intoleransi berpotensi meningkat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk, kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya kohesi sosial dan persatuan di tengah keberagaman. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan budaya politik yang inklusif dengan mengedepankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta kepentingan bersama, sehingga agama tetap berperan sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan publik, bukan sebagai instrumen untuk mempertajam konflik dan perpecahan politik.

3.4 Pendidikan sebagai Upaya Mengurangi Politisasi Agama

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik politisasi agama (Eka et al. 2026). Pemahaman agama yang komprehensif dinilai dapat mencegah masyarakat dari manipulasi politik berbasis identitas. Irwan (2019) menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan kontekstual. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan spiritualitas, tetapi juga sebagai media

penguatan kesadaran sosial dan etika politik masyarakat. Dosen Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini menekankan pentingnya literasi politik dan pendidikan keagamaan yang moderat agar masyarakat mampu membedakan antara nilai agama dan kepentingan politik praktis. Sementara itu, mahasiswa organisasi keislaman menilai bahwa kesadaran umat terhadap ajaran Islam secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengurangi penyalahgunaan agama dalam politik.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Muslich dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia yang religius membutuhkan pendidikan demokrasi yang mampu mengintegrasikan nilai keagamaan dengan prinsip toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Selain itu, Auliasari dan Achmad (2024) menjelaskan bahwa hubungan Islam dan demokrasi pada dasarnya dapat berjalan harmonis apabila nilai-nilai agama dipahami sebagai etika sosial, bukan sekadar alat legitimasi politik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik dan literasi keagamaan menjadi penting dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial dan politik masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik politisasi agama. Pemahaman agama yang komprehensif dinilai dapat mencegah masyarakat dari manipulasi politik berbasis identitas. Dosen Pendidikan Agama Islam menekankan pentingnya literasi politik dan pendidikan keagamaan yang moderat agar masyarakat mampu membedakan antara nilai agama dan kepentingan politik praktis. Sementara itu, mahasiswa organisasi keislaman menilai bahwa kesadaran umat terhadap ajaran Islam secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengurangi penyalahgunaan agama dalam politik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial dan politik masyarakat.

4. Kesimpulan

Politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia menunjukkan hubungan yang kompleks dan dinamis. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama dalam dimensi spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai sosial, moral, dan politik dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik demokrasi, agama memiliki posisi penting dalam membentuk orientasi kepemimpinan dan moralitas publik. Namun demikian, penggunaan agama dalam kontestasi politik sering kali melahirkan praktik politisasi agama yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan. Penggunaan simbol dan identitas keagamaan dalam politik elektoral berpotensi memperkuat polarisasi sosial, melemahkan rasionalitas politik masyarakat, dan menurunkan kualitas demokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keterlibatan agama dalam ruang publik, melainkan pada praktik manipulasi agama untuk kepentingan politik pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

pendidikan politik dan literasi keagamaan agar masyarakat mampu memahami agama secara substantif dan tidak mudah terjebak dalam politik identitas.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2011). *Islam dan dinamika sosial politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Azra, A. (2000). *Islam reformis: Dinamika intelektual dan gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azra, A. (2018). "Islam dan Demokrasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 5(1), 1–12.
- Atikah, Puteri, Rholand Muary, and Ramdeswati Pohan. 2025. "Dinamika Populisme Islam Pasca Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 6 (2): 278–93.
- Azhar, Anang Anas. 2026. *Pencitraan Politik Islam Memadukan Konsep Dan Aplikasi Kampanye Politik Ala Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Eka, Eka Januar, Syamsul Rijal, Firdaus M Yunus, and Suraiya It. 2026. "Pedagogi Kritis Paulo Freire Dan Transformasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 7 (1): 85–97.
- Effendy, B. (2003). *Islam dan negara: Transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fauzi, M. (2022). "Peran Organisasi Islam dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 77–89.
- Hakim, L. (2020). "Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Humaniora dan Politik*, 11(3), 140–152.
- Hefner, R. W. (2001). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hidayat, K. (2020). "Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 87–99.
- Hidayatullah, Syarif. 2026. *Pendidikan Agama Islam: Dari Orientasi Pembelajaran Ke Diskursus Keagamaan*. CV. Cipta Media Publishing.
- Hisaanah, Khauranina, B Herawan Hayadi, Elin Nurlena, Wahyu Zikriyanto, and Huda Oktalia. 2026. "Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman* 6 (1): 37–43.
- Kamil, S. (2002). *Islam dan demokrasi: Telaah konseptual dan historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lestari, Chika Angelica. 2025. "Studi Etnografi Tentang Pandangan Politik Kaum Muda Kristen Toraja Terhadap Isu Agama Dalam Pemilihan Presiden Indonesia= Ethnographic Study of Political Views of Torajan Christian Youth on Religious Issues in the Indonesian Presidential Election." Universitas Hasanuddin.
- Musawamah, Aprilia, Nur Amaliyah, Sholahuddin Al Ayubi, and Andi Rosa. 2025. "Pembaharuan Politik Islam Di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5 (1): 359–83.
- Madjid, N. (1999). *Cita-cita politik Islam era reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslich, K. S., et al. (2024). "Islam, Demokrasi, dan Budaya Politik Indonesia." *Jurnal Sosial Politik*, 12(1), 45–58.

- Nugroho, R. (2019). "Islam Moderat dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1), 25–38.
- Prasetyo, D. (2021). "Budaya Politik Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 66–78.
- Rahman, F. (2019). "Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(3), 120–134.
- Rahmadani, Subri, and Frans Tory Damara Pradipta. 2026. "Politik Identitas Dalam Pemilu Indonesia Dan Peran Institusi Budaya Serta Keislaman." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4 (2): 2000–2011.
- Robbani, Ibadurrahman. 2025. "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kuningan." Universitas Kuningan.
- Saputra, H. (2023). "Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Civic Society*, 5(1), 15–27.
- Sulaiman, A. (2021). "Demokrasi dan Tantangan Politik Identitas di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 55–67.
- Syafi'i Ma'arif, A. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Widiatmaka, P., & Nuryadi, M. H. (2023). "Perkembangan Demokrasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia." *Jurnal Civic Education*, 8(2), 101–115.
- Yusuf, M. (2022). "Demokrasi Pancasila dan Kehidupan Politik Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 13(2), 90–104.
- Wardana, Ahmad Fakhri, and Meutya Ramdhani Zalsabila. 2025. "Siyasah Sebagai Prinsip Politik Islam Dalam Menjaga Hak Minoritas Dan Mengelola Keragaman Pluralitas." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2 (3): 179–89.